

**PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019-2021 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas dan Memenuhi Syarat  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Jurusan Ekonomi  
Syariah

**Oleh:**

**Lisa Rahma Cahya**

**NPM 1851010261**

**Program Studi Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019-2021 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas dan Memenuhi Syarat  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Jurusan  
Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**Lisa Rahma Cahya  
NPM 1851010261**

**Program Studi Ekonomi Syariah**



**Pembimbing 1: Dr. Asriani, S.H., M.H.  
Pembimbing 2: Agus Kurniawan, S.E., M.Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang sumbernya berasal dari hasil komponen pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga lain lain pendapatan asli daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021 berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung serta bagaimana kebijakan pemungutan PKB dan BBNKB dalam perspektif Ekonomi Islam. Selain itu juga bagaimana kebijakan pemungutan PKB dan BBNKB di provinsi Lampung di masa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yang di teliti. Sumber data yang di dapat dalam penelitian ini juga berasal dari data sekunder yang pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS 20.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa variabel PKB dan BBNKB memiliki pengaruh yang secara simultan terhadap PAD dengan hasil uji F yaitu nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan hasil besarnya koefisien determinasi atau Adjust  $R^2$  adalah sebesar 0,385 menyatakan bahwa 38,5% variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PKB dan BBNKB . Dan sisanya yaitu 61,5% dapat dijelaskan oleh variabel diluar itu. Sedangkan secara parsial menyatakan bahwa variabel PKB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar  $0,024 < \alpha = 0,05$ . Sedangkan variabel BBNKB dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,799 > \alpha = 0,05$ .

Dilihat secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menentukan, memukul, menetapkan, membebankan, menerangkan, dan lain-lain. Secara bahasa ataupun tradisi, *Dharibah* dalam penggunaannya memang memiliki banyak makna. Tetapi para ulama menggunakan ungkapan *Dharabah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan beberapa kebijakan terkait pemungutan pajak di masa pandemi Covid-19 yang bertujuan mencari jalan tengah untuk tetap memikirkan perekonomian masyarakat dan untuk tetap mencapai target realisasi PAD di masa Pandemi Covid-19.

**Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah dan Pandemi Covid-19.**

## ***ABSTRACT***

Regional Own Revenue is income whose source comes from the results of the income component, namely regional taxes, regional levies, separated regional wealth management results and other regional original income. The formulation of the problem in this study is whether the realization of Motor Vehicle Tax and Vehicle Title Transfer Fee Motorized vehicles in 2019-2021 have had a significant effect on Regional Original Income for Lampung Province and how the PKB and BBNKB collection policies are in the perspective of Islamic Economics. Apart from that, what is the policy for collecting PKB and BBNKB in Lampung province during the Covid-19 Pandemic.

This study uses a quantitative method that aims to determine the effect between the two variables studied. The source of the data obtained in this study also comes from secondary data whose data processing uses the SPSS 20 application.

Based on the results of the analysis carried out, it was stated that the PKB and BBNKB variables had a simultaneous influence on PAD with the results of the F test, namely the value of  $F_{count} > F_{table}$  with the result that the magnitude of the coefficient of determination or Adjust R<sup>2</sup> was 0.385 stating that 38.5% of the PAD variable could be explained by variables PKB and BBNKB. And the remaining 61.5% can be explained by outside variables. While partially stated that the PKB variable has a significant effect on PAD with a significance value of  $0.024 < \alpha = 0.05$ . While the BBNKB variable is stated to have no significant effect because it has a significance value of  $0.799 > \alpha = 0.05$ .

Etymologically, taxes in Arabic are called Dharibah, which means: to oblige, to determine, to hit, to determine, to charge, to explain, and so on. In terms of language or tradition, Dharibah in its use does have many meanings. But the scholars use the expression Dharabah to pay for property collected as an obligation. The Lampung Provincial Government carried out several policies related to tax collection during the Covid-19 pandemic which aimed to find a middle way to keep thinking about the people's economy and to continue to achieve the target of realizing PAD during the Pandmei Covid-19 period.

**Keywords: Motorized Vehicle Tax, Transfer Fee for Motorized Vehicles, Regional Original Income and Covid-19 Pandemic.**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl .Letkol Hi.Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung. Telp.(0721)703289

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lisa Rahma Cahya  
NPM : 1851010261  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau sadurandari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2022  
Yang Membuat,



**Lisa Rahma Cahya**

NPM. 1851010275



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor  
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung  
Tahun 2019-2021 Menurut Perspektif Ekonomi  
Islam Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada  
Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi  
Lampung)**

**Nama : Lisa Rahma Cahya  
NPM : 1851010261  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Asriani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660506199203200**

**Pembimbing II**

**Agus Kurniawan, S.E., M.Ak.**  
**NIK. 2014080919761226103**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan**

**Dr. Erike Angeraini, M.E.Sy.**  
**NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Lisa Rahma Cahya, NPM 1851010261** Program studi **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 September 2022



**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Ahmad Habibi, M.E**

**Sekretaris : Nur Sya'adi, M.E**

**Penguji I : Muhammad kurniawan, M.E.Sy.**

**Penguji II : Dr. Asriani, S.H.,M,H**

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui  
**Dekan Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M.,Akt.**  
**NIP. 197009262008011008**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى  
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(Qs. Al Maidah : 8)

**Artinya:** "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

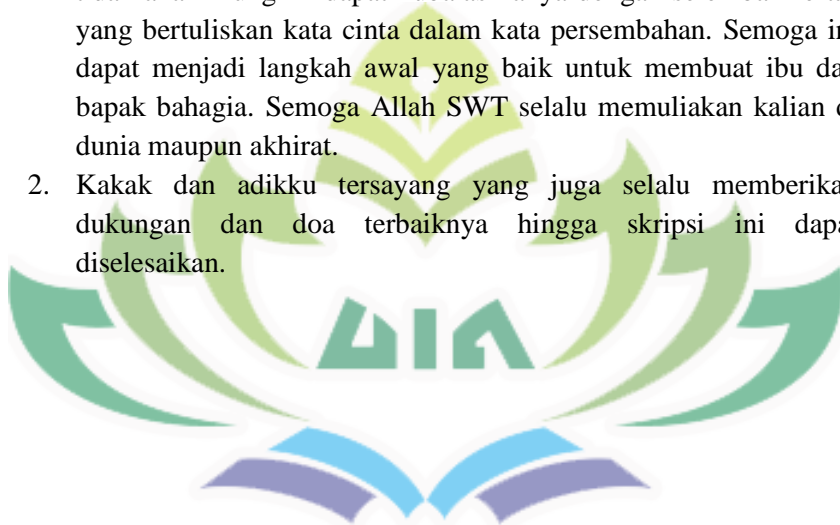




## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur atas limpahan rahmat *taupiq* dan *hidayah-Nya* kepada Allah SWT yang telah memberikan kesabaran dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu skripsi ini akan penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Musinah dan ayahanda Darmawan tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang melimpah yang tidak akan mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk membuat ibu dan bapak bahagia. Semoga Allah SWT selalu memuliakan kalian di dunia maupun akhirat.
2. Kakak dan adikku tersayang yang juga selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

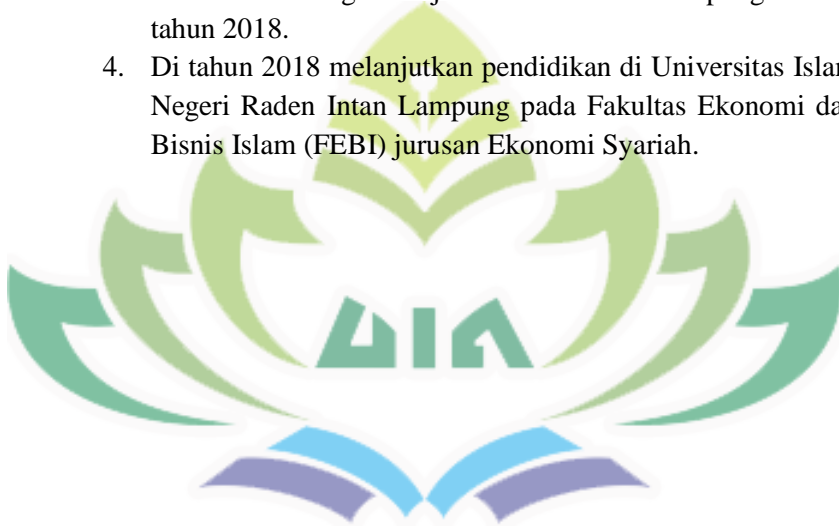


## RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Lisa Rahma Cahya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2001, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Darmawan dan Ibu Musinah.

Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Perumnas Way Kandis selesai tahun 2012.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung selesai tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Kejuruan 1 Bandar Lampung selesai tahun 2018.
4. Di tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) jurusan Ekonomi Syariah.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, dengan segala Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Shlawat serta salam yang senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). terselesaikannya skripsi ini berkat bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak, maka dari itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu sayang ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., C.A selaku ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.SY selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul skripsi terkait pendapatan daerah sehingga terpilih judul ini.
3. Ibu Dr. Asriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik satu yang telah bersedia dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Agus Kurniawan, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Akademik dua yang telah bersedia dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan-masukan serta motivasi yang membangkitkan bagi penulis.
5. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan serta banyak membantu.
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan.

7. Untuk sahabatku Mariza Anggun Pertiwi, Ambar Ningrum, Annisa Ayunandri, Dinda Astrilia, Ulva Nurul Alia, Nanda Titalia, Erlangga, Galang Pramana P, Hade Satria, M. Taufik Mahendra, Nanang Dwi Saputra yang telah senantiasa membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah khususnya kelas D, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas semua pihak yang sudah senantiasa membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,

2022

**Lisa Rahma Cahya**  
**1851010261**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	16
3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
B. Pajak .....	17
1. Pengertian Pajak .....	17
2. Fungsi Pajak .....	19
3. Syarat Pemungutan Pajak .....	19
4. Pengelompokan Pajak .....	20
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	21
6. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	22
C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	23
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	23
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) .....	25

1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	25
2. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	26
3. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	26
E. Pemungutan Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	28
1. Pengertian Pajak Dalam Islam.....	28
2. Unsur Pokok Pajak Dalam Islam .....	29
3. Jenis-Jenis Pajak Dalam Islam.....	30
F. Pajak Di Masa Pandemi Covid-19.....	31
G. Kerangka Pemikiran .....	32
H. Hipotesis.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian .....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	38
E. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Sejarah.....	43
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung .....	45
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	45
4. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	47
5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan daerah Provinsi Lampung. ....	51
6. Analisis Deskriptif.....	52
B. Analisis Data Penelitian.....	56
1. Uji Asumsi Klasik .....	58
2. Uji Regresi Linear Berganda .....	61
3. Uji Hipotesis.....	63
C. Pembahasan.....	66
1. Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2021.....	66

2. Pengaruh Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2021 .....	68
3. Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2021.....	69
4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Provinsi Lampung. ....	71
5. Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung di era Pandemi Covid-19.....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Pertumbuhan Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021.....	4
Tabel 1.2	Komponen PAD Provinsi Lampung 2019-2021 .....	5
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu.....	
Tabel 4.1	Layanan Unggulan Samsat .....	49
Tabel 4.2	Target Realisasi PKB Provinsi Lampung 2019-2021 .....	53
Tabel 4.3	Daftar Jumlah Pelunasan Pajak Kendaraan 2019-2021.....	54
Tabel 4.4	Target Realisasi BBNKB Provinsi Lampung 2019-2021.....	55
Tabel 4.5	Target Realisasi PAD Provinsi Lampung 2019-2021 .....	55
Tabel 4.6	Data Realisasi PKB, BBNKB dan PAD 2019-2021 .....	56
Tabel 4.7	Interpolasi Data Kwartal.....	56
Tabel 4.8	Uji Normalitas .....	58
Tabel 4.9	Uji Multikolinearitas .....	59
Tabel 4.10	Uji Autokorelasi .....	60
Tabel 4.11	Uji Heterokedastisitas.....	61
Tabel 4.12	Uji Regresi Linear Berganda .....	62
Tabel 4.13	Uji T.....	63
Tabel 4.14	Uji F.....	64
Tabel 4.15	Uji Koefisien Determinasi .....	65
Tabel 4.16	Daftar Kendaraan Yang Melunasi Pajak 2019-2021.....	66
Tabel 4.17	Perbandingan Realisasi PKB, BBNKB, PAD Tahun 2019-2021.....	74
Tabel 4.18	Data Terkait Pemutihan Provinsi Lampung tahun 2021.....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA.....	52
Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan PKB Provinsi Lampung Tahun 2019-2021 .....	54
Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan BBNKB provinsi Lampung Tahun 2019-2021 .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis perlu memberikan uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berhubungan dengan tujuan dari skripsi ini dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dari maksud yang di tuju. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pedapatan Daerah Provinsi Lampung).” Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari beberapa istilah dari judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh

Dikutip dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.”<sup>1</sup> Pengaruh merupakan kekuatan yang timbul dari suatu benda atau orang dan juga dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan.<sup>2</sup>

#### 2. Realisasi

Dikutip dari Mardiasmo di dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan*, realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata.<sup>3</sup>

#### 3. Pajak

Tercantum dalam Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak yaitu kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (4th ed.) (jakarta: Gramedia Pusat, 2011).

<sup>2</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung, 1998).

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009).

oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

#### 4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak.<sup>5</sup>

#### 5. Bea Balik Nama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.<sup>6</sup>

#### 6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah yang menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Nimas Galuh Savitri and Ary Yunita Anggraeni, "Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019", 2021.

<sup>6</sup> Septiana Widya Ningsih and Anim Rahmayati, "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah".

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002).

## 7. Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan Syariah/nilai-nilai ketuhanan.<sup>8</sup>

## 8. Pandemi Covid-19

Coronavirus atau Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah diatas dan studi kasus yang dipilih maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui **“Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Era Pandemi Covid-19”**

## B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah.<sup>10</sup> Peningkatan PAD amat sangat menentukan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah karena semakin tinggi PAD di suatu daerah, maka daerah tersebut akan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga memiliki kemampuan untuk berotonomi. Salah satu sumber PAD

<sup>8</sup> *Konsep Ekonomi Islam*, (Kemendikbud, 2020).

<sup>9</sup> Peter D.O. Davies, “Multi-Drug Resistant Tuberculosis”, Vol. 3 No. 1 (2002), p. 9–12..

<sup>10</sup> Nimas Galuh Savitri and Ary Yunita Anggraeni, “Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019”.

yang ada di Provinsi Lampung adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.<sup>11</sup>

Penarikan pungutan pajak daerah merupakan suatu perwujudan dari peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pajak daerah yang dikelola pemerintah Provinsi Lampung adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Dalam pelaksanaannya pemungutannya di bantu oleh beberapa kantor cabang di berbagai wilayah provinsi Lampung Dengan pemberian kemudahan-kemudahan pembelian kendaraan bermotor membuat tingkat konsumtif dari masyarakat akan semakin meningkat, hal ini terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia terutama di provinsi Lampung mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Pertumbuhan Kendaraan Bermotor**  
**tahun 2019-2021**

<b>TAHUN</b>	<b>R4</b>	<b>R2</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
2019	420. 848	3.129.433	3.550.281	-
2020	437. 409	3.200.557	3.637.966	1,02
2021	460. 610	3.304.465	3.765.075	0,01

*Sumber: bps.go.id*

Data dari tabel diatas adalah jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor tahun 2019-2021. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung bertambah setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh sifat konsumtif manusia yang semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 terhitung

---

<sup>11</sup> Muhammad Nasir Nurul Aliah, Abu Bakar Hamzah, “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh”

sebanyak 3.550.281 unit kendaraan bermotor yang kemudian bertambah di tahun 2020 yaitu sebanyak total 3.637.966 unit kendaraan. Pada tahun 2021 angka pertumbuhan kendaraan bermotor kembali naik menjadi 3.765.075 unit. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kebutuhan mobilitas masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-harinya maka masyarakat cukup konsumtif terhadap pembelian kendaraan.

**Tabel 2.1**  
**Data Jumlah Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**  
**tahun 2019-2021**

<b>TAHUN</b>	<b>R4</b>	<b>R2</b>	<b>JUMLAH</b>
2019	134.358	2.122.964	2.257.322
2020	159.617	2.301.941	2.461.558
2021	137.922	2.357.435	2.495.357

*Sumber: bps.go.id*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penunggak pajak disetiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2019 penunggak pajak bermotor di provinsi Lampung sebesar 2.257.322 unit dan bertambah di tahun 2020 menjadi 2.461.558 unit. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang menunggak kembali bertambah menjadi 2.495.357 unit.

**Komponen PAD Provinsi Lampung Tahun 2019-2021**

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pajak Daerah	2.627.888.230.394	2.386.345.268.304	2.721.138.145.704
Retribusi Daerah	11.069.477.866	17.080.208.104	14.664.095.996
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	27.837.905.348	29.873.630.623	33.335.927.752
Lain lain PAD yang sah	351.271.677.550	408.987.372.039	480.531.777.812
<b>Jumlah</b>	<b>3.018.067.291.160</b>	<b>2.842.286.479.070</b>	<b>3.249.669.847.259</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2019-2021*

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa realisasi PAD pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.018.067.291.160 dengan Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar. Sementara itu pada tahun 2020 realisasi PAD di Provinsi Lampung turun sebesar Rp. 175.780.812.090 yaitu menjadi Rp. 2.842.286.479.070. hal ini sebagian besar dipengaruhi dengan mulai masuknya kasus Covid-19 ke Indonesia khususnya Provinsi Lampung. Hal tersebut menyebabkan kelumpuhan di beberapa sektor terutama sektor perekonomian masyarakat. Kemudian di tahun 2021 terjadi kenaikan PAD yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 407.383.368.189 yaitu menjadi Rp. 3.249.669.847.259.

Konsep pajak sebenarnya sudah ada sejak di zaman Rasulullah pada masa pemerintahannya. Rasulullah menerapkan pajak (*jizyah*) sebagai pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim dan khususnya ahli kitab dengan tujuan sebagai jaminan keselamatan harta, jiwa, kepemilikan, kebebasan melakukan ibadah dan juga pengecualian dari wajib militer. Selain itu, pada zaman pemerintahannya, Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj* yang artinya adalah pajak tanah yang dibebankan kepada kaum non-muslim ketika wilayah *Khabair* ditaklukan. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin, dan juga pemilik lamanya diberikan hak untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia apabila membagi hasil produksinya dengan negara sebagai sumber pemasukan.<sup>12</sup>

Ada lima unsur pokok pajak menurut Syariah yang terdapat didalam kitab Zallum, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Subjeknya yaitu kaum muslim yang *ghaniyyum* (kaya) saja, dan juga tidak termasuk non muslim,
- c. Obyeknya adalah harta (*Al-maal*)
- d. Tujuan utama hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim saja)
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat yang segera diatasi oleh ulil amri.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardlawi, Hukum Zakat, (jakarta: Pustaka Inter Nusa, 1997).

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa pajak hanya berlaku kepada kaum muslim yang berada saja dan juga objeknya berupa harta. Selain itu juga pajak dipungut pada saat ada keadaan genting saja dengan tujuan utamanya ialah digunakan untuk membiayai kebutuhan kaum muslim saja.

Upaya pengenaan pungutan pajak dilakukan sebagai salah satu cara yang dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Di dalam Islam ada beberapa jenis sistem pemungutan pajak seperti *Jizyah, Fa'i, Kharaj, Ushr dan Zakat*. Pajak atau *Dharabah* adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang didasari oleh Ijtihad Ulil Amri yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pajak kemudian akan dialokasikan untuk memadai penyelenggaraan sistem pembangunan dan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan kepada prinsip demokrasi, adil, dan merata.

Penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan disrupsi secara global pada rantai kegiatan perekonomian. Pada saat itu, mayoritas negara-negara yang terdampak Covid-19 menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan dan pembatasan mobilitas sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya.<sup>13</sup> Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 menyebabkan dampak buruk dalam berbagai aspek, termasuk juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya tidak memiliki penghasilan lagi. Karena hal tersebut banyak wajib pajak yang terbebani dalam membayar pajak salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan juga bila melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sehingga berpengaruh terhadap penurunan angka realisasi PAD Provinsi Lampung tahun 2020.

Terkait penyebarluasan Pandemi Covid-19, pemerintah tidak tinggal diam dalam menanggapi hal ini. Dalam rangka untuk mencapai target realisasi PAD dari tahun 2020, pemberlakuan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung dapat diharapkan dapat membantu merealisasikan target PAD. Di tahun 2020 peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dalam menyelesaikan dampak permasalahan perekonomian

---

<sup>13</sup> Jurnal Ilmiah, "Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Risiko Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali",



dari Covid-19 dengan mengesahkan insentif pajak No.110/PMK.08/2020 untuk menggantikan PMK No.23/PMK.03/2020 yang sudah diterbitkan di awal bulan April tahun 2020. Cara ini dinilai dapat menjaga ke stabilan perekonomian nasional yang sedang menurun akibat pandemi Covid-19 dengan kenaikan insentif pajak yang diberikan dan juga telah diperpanjang jangka waktu masa pajak Desember tahun 2020 dengan pemberian insentif, dengan kenaikan besarnya pengurangan angsuran PPh menjadi 50%<sup>14</sup>, dan juga pemberlakuan kebijakan program pemutihan di tahun 2021 yang di adakan oleh pemerintah guna merealisasikan target pendapatan daerah Provinsi Lampung di tahun tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka beberapa Masalah yang akan diteliti yaitu meliputi:

1. Apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Lampung?
2. Apakah realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung?
3. Apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung?
4. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah provinsi Lampung?
5. Bagaimana kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung?

---

<sup>14</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, "Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Akuntan Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia Refleksi 63", 2021.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2021 terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung.
2. Mengetahui pengaruh realisasi bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019-2021 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.
3. Mengetahui pengaruh realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021 terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.
4. Mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah provinsi Lampung.
5. Mengetahui bagaimana kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung di masa Pandemi Covid-19

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti
  - a. Menambah pengetahuan peneliti mengenai perpajakan dan pendapatan daerah.
  - b. Sebagai suatu bentuk implementasi atas teori teori dan pembelajaran yang telah didapatkan di perkuliahan seputar perpajakan dan pendapatan daerah.
2. Bagi Pembaca
  - a. Bisa digunakan sebagai bahan refrensi penelitian selanjutnya terkait dengan judul penelitian yang berkaitan.
  - b. Sebagai bahan literatur dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wacana baru di dunia akademis.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut, maka terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap hasil karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan proposal ini, dengan tujuan sebagai bahan referensi dan menghindari adanya kesamaan pembahasan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Nur Safitri (2021) yang berjudul Kontribusi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 hingga 2020 PKB dapat dikatakan berkontribusi baik, sedangkan BBNKB dapat dikatakan berkontribusi sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 merupakan sebelum adanya masa pandemi Covid-19, sedangkan ditahun 2020 merupakan pada masa pandemi Covid-19.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Septiana Widya Ningsih, Anim Rahmayati (2018) yang berjudul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Aceh. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB akan semakin tinggi pula PAD. Sebaliknya daerah dengan penerimaan yang bersumber dari PKB dan BBN-KB relatif rendah maka PAD daerah tersebut juga rendah. Di antara kedua variabel tersebut (PKB) dan BBN-KB, variabel yang pengaruhnya lebih dominan terhadap peningkatan PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aliah, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir (2019) yang berjudul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

---

<sup>15</sup> Dina Nur Safitri, "KONTRIBUSI PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)", Vol. 01 No. 1 (2021), p. 145–165..

KB) Terhadap PAD Aceh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Aceh. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB akan semakin tinggi pula PAD. Sebaliknya daerah dengan penerimaan yang bersumber dari PKB dan BBN-KB relatif rendah maka PAD daerah tersebut juga rendah. Di antara kedua variabel tersebut (PKB) dan BBN-KB, variabel yang pengaruhnya lebih dominan terhadap peningkatan PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Yudhita Pramita Sari, Hero Priono, Tituk Diah Widayantie (2020) yang berjudul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Berdasarkan data pada tahun 2015-2018 yang diperoleh peneliti dari Badan Pendapatan Daerah Prov. Jawa Timur menunjukkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah tahunnya hal tersebut tidak lepas dari beberapa indikator yang menunjang meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hesni Widi Astuti, Dian Murniati, Haninun, dan Nurdiawansyah (2021) yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19” Yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan realisasi PKB dan BBNKB yang disebabkan oleh keterlambatan pelunasan hutang pajaknya karena perekonomian masyarakat yang terdampak.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

---

<sup>16</sup> Muhammad Nasir Nurul Aliah, Abu Bakar Hamzah, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Cindy Yudhita et al., “PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KINERJA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”, Vol. 5 (2020), p. 24–30.

<sup>18</sup> Hesni Widi Astuti et al., “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)”, Vol. 10 (2021).

1. Dina Nur Sfitri (2021) "Kontribusi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di rovinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)".

**Persamaan:** memiliki persamaan pembahasan dan variabel yang digunakan

**Perbedaan:** terdapat perbedaan di periode pelaksana nya dan ada di metode penelitian yang digunakan serta lokasi studi kasus yang diteliti.

2. Septiana Widya Ningsih, Anim Rahmayati (2018) " Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah".

**Persamaan:** persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kuantitatif.

**Perbedaan:** terdapat tiga variabel di penelitian ini, sedangkan penelitian dalam judul ini hanya memiliki dua variabel. Dan juga ada penambahan pembahasan Covid-19 dan Persektif Ekonomi Islam

3. Nurul Aliah, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir (2019) "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD Aceh".

**Persamaan:** persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu Kuantitatif.

**Perbedaan:** Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tidak adanya pembahasan tentang Covid-19 dan Perspektif Ekonomi Islam

4. Cindy Yudhita Sari, Hero Priono, Tituk Diah Widyantie (2020) "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja Dengan Pendapatan Asli Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Interving".

**Persamaan:** persamaan dengan penelitian ini adalah motde penelitian yang di gunakan, yaitu kuantitatif. Dan juga sama-sama mewmiliki dua variabel, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan.

**Perbedaan:** perbedaan terletak pada pembahasan tentang Covid-19 dan juga Perspektif Ekonomi Islam yang tidak dibahas di penelitian ini.

5. Hesni Widi Astuti, Dian Murniati, Haninun, dan Nurdiawansyah (2021) yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid- 19”.

**Persamaan:** persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan di masa Pandemi Covid-19 dan lokasi penelitian.

**Perbedaan:** perbedaan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan variabel objek penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

### Bab I. Pendahuluan

Didalam bab pendahuluan terdiri dari unsur penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

### Bab II. Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Bab ini berisikan teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis penelitian ini.

### Bab III. Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, definisi variabel penelitian, teknik analisis data dengan uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

### Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang defkripsi objek penelitian, hasil analisis uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear berganda, hasil analisis uji hipotesis, dan pembahasan.

**Bab V. Penutup**

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran dari hasil analisis yang sudah dilakukan di bab sebelumnya.

**Daftar Rujukan****Lampiran**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi lampung tahun 2019-2021 dalam perspektif ekonomi Islam di era pandemi Covid-19 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung), maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Lampung periode tahun 2019-2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki signifikansi sebesar 0,024 yang artinya lebih kecil jika dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$ .
2. Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2019-2021, yang dibuktikan dengan hasil analisis variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memiliki signifikansi sebesar 0,799 yang artinya lebih besar jika dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$ . Maka demikian hal itu dapat dikatakan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) periode tahun 2019-2021 yang dibuktikan dengan hasil uji F yang didapatkan yaitu nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3,644 sedangkan pada  $F_{tabel}$  sebesar 3,28. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yang juga dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,031 < 0,05$ . Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan



besarnya koefisien determinasi atau Adjust  $R^2$  sebesar 0,385 yang berarti bahwa 38,5% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dan sisanya (100% - 38,5%) yaitu 61,5% dapat dijelaskan oleh variabel diluar itu.

4. Di dalam Islam ada beberapa jenis sistem pemungutan pajak seperti *Jizyah*, *Fa'i*, *Kharaj*, *Ushr* dan *Zakat*. Pajak atau *Dharabah* adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang didasari oleh Ijtihad Ulil Amri yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pajak kemudian akan dialokasikan untuk memadai penyelenggaraan sistem pembangunan dan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan kepada prinsip demokrasi, adil, dan merata. Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung adalah suatu pungutan yang sifatnya dipaksakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai beberapa penyediaan kebutuhan barang dan jasa publik, mengatur perekonomian dan juga sebagai balas jasa atas keamanan masyarakat. Karena sifatnya dipaksakan, maka pengenaan pajak kendaraan bermotor ini wajib di lunasi oleh Wajib Pajak setiap tahunnya dan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda bila ada keterlambatan dalam pelunasannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Wajib Pajak selalu membayarkan pokok pajaknya tepat waktu setiap tahun dan menjadikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu pajak yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung periode tahun 2019-2021.
5. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Lampung adalah dengan memberikan keringanan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Lampung No.18 Tahun 2020 yang berisi tentang penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga Wajib Pajak diharapkan untuk melunasi hutang pokok pajaknya. Selain itu juga,

pemerintah Provinsi Lampung mengadakan program pemutihan yang berisi penghapusan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan BBN II yaitu pajak dari mutasi dan balik nama kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan dalam provinsi karena banyak dari Wajib Pajak yang kehilangan pekerjaannya dan dipengaruhi oleh pemberlakuan pembatasan pelayanan bahkan penutupan beberapa gerai Samsat yang gencar dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran yang mengakibatkan Wajib Pajak terlambat atau bahkan tidak membayarkan hutang pajaknya. Selain itu, pengetahuan wajib pajak tentang sistem pembayaran online juga belum banyak disosialisasikan sehingga masih banyak wajib pajak yang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung**

Lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi terkait sarana prasarana online yang ada sehingga lebih diketahui oleh masyarakat luas. Menyediakan informasi terkait transparansi anggaran di internet agar bisa memudahkan masyarakat mengetahuinya. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memaksimalkan kinerja sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para wajib pajak.

### **2. Pemerintah Provinsi Lampung**

Di harapkan agar terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas sehingga memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap masyarakat dan juga untuk terus berupaya meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB di provinsi Lampung di masa Pandemi Covid-19 sehingga dapat terus meningkatkan PAD Provinsi Lampung.

### **3. Bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas variabel penelitian misalkan menambah beberapa variabel yang berpengaruh terhadap PAD Provinsi Lampung seperti Pajak Bahan Bakar dan Juga Pajak Air Permukaan.**

4. Untuk penggunaan aplikasi SAMSOLNAS sebaiknya lebih di permudah lagi, karena aplikasi tersebut tidak dapat bekerja secara efektif sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Dkk. *Perpajakan* (2nd ed.). Jojakarta: Salemba Empat, 2016.
- Abdurrahman Fatoni. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andrianto. “Studi Terhadap Peran Etika Pengelolaan Pajak Menurut Islam”. *Manajemen Ekonomi*. Vol. 24 (2019), p. 12–22.
- JHU CSSE COVID-19 Data. “Covid-19 Data Repository by The Center for System Science and Engineering (CSSE) at John Hopkins University”, 2022 (On-line), tersedia di: <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> (2022).
- Davies, Peter D.O. “Multi-Drug Resistant Tuberculosis”. *CPD Infection*. Vol. 3 no. 1 (2002), p. 9–12.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (4th ed.). Jakarta: Gramedia Pusat, 2011.
- Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin. “Jurnal Prespilog Indonesia: Penyakit Virus Corona 19”. Vol. 40 (2020), p. 119–129.
- Dr.Kadir. *Statistika Terapan* (3rd ed.). Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dwi Anggraeni Saputri, Angga Jaya Saputra. “Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2016-2018”. *Accounting Global*. Vol. 4 (2020), p. 36–58.
- Ega Dewi Sartika, Nurul Afifah, Sri Nirmala Sari. “Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan”. *Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. Vol. 5 (2021), p. 144–159.
- Endang Sri, M Budimantara Nusryadi, Astuti, Tutut Dewi. *Dasar Dasar Statistika Penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: Sibuku Media, 2017.

- Fitri, Tri Wahyudi, Ajidin. “Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pemeliharaan Dan Perluasan Jalan Di Kabupaten Purwakarta”. *Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 8 (2021), p. 297–314.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam* (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Hesni Widi Astuti et al. “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)”. Vol. 10 (2021).
- Ilmiah, Jurnal et al. “Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Risiko Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali”, 2021, 986–999.
- Imam, Ghazali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24 Update Bayesian SEM Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2017.
- Indonesia, Ikatan Akuntansi. “Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Akuntan Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia Refleksi 63”, 2021.
- Iskandar, Agus. “Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kecamatan Tanjungkarang Pusat)”. *Ilmu Hukum*. Vol. 11 (2016).
- Karmila. *Mengenal Perpajakan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Konsep Ekonomi Islam*. Kemendikbud, 2020.
- Leza Christianingsih, Achmad Husaini, Yuniadi Mayowan. “Analisis Pemungutan Pajak Hotel Atas Vila Di Paguyuban Supo Songgoriti”. *Perpajakan*. Vol. 9 no. 1–10 (2016) (On-line), tersedia di: [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id) (2016).

Liberti Pandiangan. *Dministrasi Perpajakan , Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Surabaya: Erlangga, 2014.

Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.

----- . *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2009.

Maria Magdalena Bate'e. "Analisis Sistem Pelaksanaan Penghitungan Pajak Atas Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Gunung Sitoli". *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*. Vol. 4 (2018), p. 1163–1184.

Marihot P Siahaan. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

----- . *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Munawwir, A. W. *Kamus: Al-Munawir*. Surabaya: pustaka Progresif, 2002.

Mustaqiem, Dr., SH., M.Si. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.

Nengah Suastika. "Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak". *Komunikasi Hukum*. Vol. 7 (2021), p. 326–335. (On-line), tersedia di: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh> (2021).

Nuraini, Muslimin, & Kahar, A. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi"., 2018, 92–101.

Nurul Aliah, Abu Bakar Hamzah, Muhammad Nasir. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh". Vol. 6 (2019), p. 33–49.

P, Sulisty Wardani Permatasari, dan Rita Intan. "Pengaruh Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf Umum Bagian Pergudangan Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) Di

- Tangerang”. Vol. 12 no. 1 (2022), p. 1–12.
- “Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2020”., n.d.
- “Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 23 Tahun 2019”., n.d.
- Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo. “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak”. Vol. 5 no. 2 (2016), p. 395–414.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Safitri, Dina Nur. “KONTRIBUSI PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)”. Vol. 01 no. 1 (2021), p. 145–165.
- Savitri, Nimas Galuh, and Ary Yunita Anggraeni. “Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019”., 2021, 1–10.
- Septiana Widya Ningsih, and Anim Rahmayati. “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah”., n.d.
- Setiawan, Djodi, and Mia Isporima. “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWABARAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013 - 2019”. Vol. 5 no. November (2021).
- Sudarman, I Putu Agus dan Gede MrthaSudiartha. “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah”. *E-Jurnal Manajemen*. Vol. 9 (2020), p. 1338–1357.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:

- Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Vol. 53. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung, 1998.
- Susana Sintia Wowiling, Ventje Ilat. "Analisis Prosedur Dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendaootan Daerah Provinsi Sulawesi Utara". Vol. 3 (2015), p. 1016–1022.
- Sutianingsih, Shinta Eka Kartika dan Widowati. "Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara". Vol. 9 (2021).
- Suyanti dan Dahlan A. *Perpajakan: Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Jawa Timur: Empatdua Media, 2016.
- Tanan, Christina Irwati, Kondrad Anselmus Doko. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Masa Covid-19 Di Kota Jayapura". Vol. 4 no. 1 (2021), p. 377–389.
- Thomas Sumarasan, SE, MM. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (5th ed.). Jakarta: Penerbit Index, 2017.
- Ust. H. Abdul Aziz Abdur Rauf. *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: CJJ Cordoba, 2019.
- Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, N. K. "Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Struktur Desentralisasi Sebagai Variabel Pemoderasi". *Akuntansi.*, 2017  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81>.
- Yudhita, Cindy et al. "PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KINERJA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”. Vol. 5 (2020), p. 24–30.

Yusuf Qardlawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka InterNusa, 1997.

